



97.362 LEMBAR SPPT PBB KOTA YOGYA 2024 DIDISTRIBUSIKAN

## Topang Fiskal Daerah, Butuh Sinergitas Masyarakat

**YOGYA (KR)** - Sebanyak 97.362 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogya 2024 mulai didistribusikan ke wajib pajak. Jenis pajak tersebut merupakan salah satu tiang yang menopang kemampuan fiskal daerah sehingga dibutuhkan sinergitas bersama masyarakat.

Menurut Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, PBB memiliki ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Masing-masing terdiri dari unsur pemerintah daerah termasuk aparaturnya di wilayah, kalangan perbankan maupun PT Pos Indonesia serta masyarakat selaku wajib pajak. "Betapa PBB menjadi sangat khusus bagi kami karena menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat di Kota Yogya. Sehingga ini merupakan kerja bersama yang harus didorong oleh seluruh ekosistem tadi," tandasnya di sela penyerahan SPPT PBB Kota Yogya 2024, Selasa (30/1).

Dari total 97.362 lembar

SPPT PBB tersebut nilai ketetapan pajaknya mencapai Rp 145,6 miliar. Sementara target yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk perolehan PBB tahun ini ialah minimal Rp 120 miliar. Pada tahun 2023 lalu realisasi PBB mencapai Rp 111,7 miliar. Sedangkan distribusi SPPT PBB dilakukan secara simbolis kepada para lurah dan mantri pamong praja. Pada kesempatan itu sekaligus diserahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada Pemimpin Cabang Senopati Bank BPD DIY, Gunawan H Baskoro, didampingi dari Bank Jogja, Bank BNI dan Bank Mandiri.



*KR-Arch/Wahdan*  
**Ir Aman Yuriadijaya MM menyerahkan SSPD PBB kepada Gunawan H Baskoro didampingi Bank Jogja, Bank BNI dan Bank Mandiri.**

Aman menegaskan peran bersama dari seluruh ekosistem harus mampu ditegakkan. Hal ini karena sebagai salah satu penopang kemampuan fiskal daerah, perolehan PBB akan berpengaruh terhadap keberlangsungan layanan pemerintahan.

"Harus kami akui, ada dua tiang yang menopang kemampuan fiskal yakni PBB ini dan pajak hotel restoran. Tanpa dua penopang itu maka berbagai aspek pelayanan menjadi tidak bisa berjalan secara optimal," imbuhnya.

Dirinya mencontohkan beberapa isu strategis yang harus dihadapi oleh Kota Yogya pada tahun ini. Salah satunya ialah pengelolaan persampahan di mana mulai April tahun ini sudah dimulai desentralisasi di tiap daerah. Sebelumnya, pengelolaan sampah di Kota Yogya bergantung pada TPA Piyungan dengan nilai Rp 25.000 per ton. Sedangkan ketika sudah mulai desentralisasi maka nilai untuk mengelola sampah bisa melonjak hingga Rp 450.000 per ton. Oleh karena itu beban keuangan daerah tentu juga akan semakin berat.

Di samping itu aspek pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan daya saing ekonomi di Kota Yogya juga tidak bisa dikesampingkan. Di antaranya melalui berbagai program pengembangan berbasis kawasan mulai dari Kotagede, Kotabaru, Pakualaman dan lainnya. dari peningkatan daya saing ekono-

mi, imbu Aman, tak lain ialah untuk menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat. "Jadi apa yang sudah menjadi kewajiban dari wajib pajak itu nantinya juga di kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan,

perbaikan maupun membangun ekosistem ekonomi. Oleh karena itu butuh dukungan dan sinergitas agar program PBB dapat berjalan dengan baik," terangnya.

Pit Kepala Badan Penge-

lolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, menyebut pihaknya sudah membuka pelayanan pembayaran PBB bersama kalangan perbankan, PT Pos Indonesia termasuk kanal pembayaran digital. Akan

tetapi masih ada beberapa masalah teknis yang kerap dihadapi seperti wajib pajak yang belum tertib dalam membayarkan pajaknya serta kebiasaan pembayaran PBB jelang jatuh tempo pada September. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005